

Bupati Tak Ambil Pusing



BOYOLALI—Bupati Boyolali, Seno Samodro, tak ambil pusing dan mempersilakan aparat penegak hukum mengusut dugaan "sandiwara" lelang proyek kantor terpadu Pemkab setempat.

Septhia Rynthie
septhia.rynthie@solopos.com

Orang nomor satu di jajaran pemerintahan Kota Susu itu mempersilakan polisi memeriksa proyek yang berada di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo. "Kalau menurut saya itu baik. Ya silakan saja. Wong yang pasti Boyolali sudah WTP [wajib tanpa pengecualian], sehingga administrasinya pasti benar," ujar Bupati, ketika ditemui *Espos* di ruang

► Seno mempersilakan aparat periksa kasus relokasi.

► Polisi belum menemukan bukti kasus relokasi.

kerjanya, Rabu (6/11).

Namun perihal kasus itu, Bupati justru menilai ada kejanggalan. Sebab dugaan korupsi sebagaimana yang dituduhkan kepada Pemkab Boyolali menurut dia tidak jelas. "Bagi saya ada yang aneh. Katanya awal-awal dulu ada korupsi [dalam pelaksanaan proyek relokasi tersebut] senilai Rp80 miliar, tapi kok sekarang malah jadi Rp6 miliar?" tanyanya.

Bupati mengatakan jika nilai dana yang dikorupsi dalam laporan tersebut mencapai Rp80 miliar menurut logika sangat tidak mungkin. Sebab nilai keseluruhan proyek tersebut, hanya sekitar Rp74

miliar. "Kalau nilai Rp80 miliar itu kan karena di situ ada pajak dan sebagainya. Kok dilaporkan dikorupsi Rp80 miliar, makanya menurut saya ada yang aneh. Sementara kalau saya tanya lagi, yang Rp6 miliar yang dikorupsi itu yang mana?"

Bupati mencontohkan anggaran pembangunan gedung satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termahal ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD), yakni sekitar Rp7,6 miliar. "Sekarang mungkin tidak kalau anggaran pembangunan hanya Rp7,6 miliar itu dikorupsi Rp6 miliar?" tandasnya.

Di sisi lain, Bupati mengatakan menurut aturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah juga mengatur tentang jaminan bagi rekanan atau kontraktor untuk mendapatkan keuntungan sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Bersambung ke Hal. 8 Kol. 1

Bupati Tak Sambungan dari Hal. 1

"Jadi misalnya kalau nilai proyek Rp7,4 miliar, dan sepuluh persennya keuntungan untuk kontraktor, itu wajar. Dan uang yang sepuluh persen itu kan berarti ada di penyedia jasa, bukan di Bupati atau Pemkab," tegasnya.

Bupati justru menilai tuduhan dan tudingan seputar lelang proyek relokasi datang dari pihak-pihak yang notabene lawan politiknya. "Dan saya nilai itu gegabah. Sebab dari pelaksanaan pembangunan tersebut, dari bukti bangunan bisa dilihat sendiri. Ada, dan jelas, laporan juga lengkap. Jadi silakan dicek sendiri. Apalagi yang namanya pelaksanaan proyek, BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] maupun BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] itu pasti rutin mengawasi. Sehingga jika ada penyelewengan, pasti segera diketahui," paparnya.

Bupati juga menengarai mencuatnya kasus tersebut tak lepas dari masalah politik. Namun dirinya menegaskan tak akan menggubris. "Ya saya yakin muaranya ke politik. Tapi kalau saya enjoy saja. Perkara visi dan misi tercapai dan lawan politik jadi *senep*, ya itu urusannya lawan politik," pungkasnya.

Terpisah Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, Agus Purmanto, menyatakan

agar kasus lelang proyek relokasi tersebut tidak menimbulkan fitnah dan demi menjaga ketenangan masyarakat Boyolali, pihaknya mempersilakan aparat terkait untuk meneliti kebenarannya.

"Silakan masing-masing pihak yang mempunyai kewenangan untuk meneliti kebenarannya dengan melakukan penelitian didampingi oleh Inspektorat. Dalam hal ini kami akan sangat terbuka dan menjunjung tinggi supremasi hukum."

Terpisah, dalam tiga bulan terakhir penyelidikan, jajaran Polres Boyolali belum menemukan alat bukti atas kasus proyek relokasi. Kapolres Boyolali, AKBP Budi Haryanto, mengungkapkan hal itu saat menerima sejumlah aktivis peduli antikorupsi di ruang kerjanya, Rabu siang. "Mengenai dugaan itu, sudah kami tangani dan sekarang tahap penyelidikan. Sudah tiga bulan, sejauh ini belum ditemukan alat bukti," kata Budi.

Dia meyakinkan jajarannya tak pandang bulu dalam mengusut kasus tersebut. "Yakinlah, Polres enggak main-main. Saya tak pandang bulu, [mau] tersangka orang pemerintahan, orang sipil yang bekerja sama dengan pemerintah. Maka jika ada yang hadir di sini bisa membantu kami, saya terima terbuka," paparnya.

Di bagian lain, Kapolres menyatakan laporan ke Mabes Polri tersebut dilayangkan oleh Duo G atau Sujarwanto alias Gombloh dan Sri Wahyudi alias Glendoh. Mereka merupakan koordinator Barisan Merah-Putih Pengging Boyolali.

Hingga kini pihak Satreskrim telah mengklarifikasi sejumlah hal di lapangan. Klarifikasi itu termasuk dokumen, pengaduan mengenai lelang manual maupun *e-proc*. Tak terkecuali permasalahan mepetnya selisih nilai penawaran pemenang proyek pembangunan kompleks Pemkab dengan pagu anggaran.

"Sampai sekarang masih berlangsung. Termasuk [terhadap] yang dilaporkan [anggaran] 2012, beberapa paket pekerjaan. Tentu kami tak langsung [memeriksa] bangunan," terang Kanit 3 Satreskrim, Aiptu Arifin, yang mendampingi Kapolres dan Kasatreskrim, AKP Parwanto, saat berdialog dengan sejumlah aktivis tersebut.

Kemarin beberapa elemen warga yang datang bertemu Kapolres Boyolali antara lain A. Rahman dari Lembaga Pengkajian Pemberantasan Korupsi; Thontowi Jauhari mantan anggota DPRD Boyolali yang saat ini aktif di Lembaga Pusat Kajian Pencerahan Politik Indonesia, dan Alif Basuki dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro). (Oriza Vilosa)